

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Entrepreneur Muslim Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Johar Jakarta Pusat

Dalmeri

Universitas Indraprasta PGRI
E-mail: Dalmeri300@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Industrialization
Economy
Muslim Entrepreneurs

In the era of regional autonomy the political-economic transformation is still dominated by state and market, while society is in marginal position. Society is often only the object of exploitation of the state and the market. Industrialization developed by the state and the market often forces the middle and small classes to be isolated in their own environment.

The potential of natural resources within the middle and small communities is often exploited through access and governance of state and market dominance. When viewed based on the potential that exists, should the governance of the Indonesian economy is based on the industrialization of small and medium-sized society.

Experience in the economic crisis of 1998, shows that small and medium industries in the medium and small are relatively able to survive. Compare with large industries that collapsed a lot, unable to survive because the wheels of production driven with machines from debt. The small and medium-sized economy has so far become the main savior of the crisis and the stagnation of economic growth in Indonesia. Efforts to develop local economies through industrialization driven by the urban middle-class society can be an alternative to creating resilience of populist economy, especially in stemming globalization characterized by economic liberalization in various business sectors.

This research seeks to analyze some cases, and strategic experience. Especially with regard to Muslim entrepreneurs in the Johar Baru area of Central Jakarta in carrying out various strengthening strategies in local economic development. Entrepreneur Muslim here refers more to the identity of these business actors who are Muslim identity and have a commitment in applying Islamic ethics in running their business and strengthening fellow profession.

I. PENDAHULUAN

Pasca bergulirnya reformasi, dinamika sosial politik masyarakat kelas menengah dan kecil makin mengarah pada transformasi sosial menengah dan kecil. Fokus utama gerakan dan transformasi kelas menengah dan kecil adalah upaya memperkuat kapasitas kemandirian masyarakat kecil di kawasan perkotaan, baik dari sisi ekonomi maupun politik secara berkelanjutan (Adi 2017: 329). Ketimpangan pada salah satu kutubnya akan berdampak pada tidak sehatnya upaya pemberdayaan yang sedang dirintis.

Kedewasaan berpolitik masyarakat di tingkat kelas menengah dan kecil yang akhir-akhir ini mulai tampak, tentu tidak akan menjadi lengkap ketika pada sisi lain kondisi ekonomi mereka berada pada titik yang mengkhawatirkan yang sewaktu-waktu dapat menggerus idealisme mereka (Strassler 2009: 72). Pada aspek ini tampaknya sebuah transformasi kelas menengah dan kecil membutuhkan sinergi antara berbagai aktor baik negara, capital-pasar dan masyarakat, dalam proses transformasi politik (desentralisasi dan demokratisasi) dengan proses transformasi ekonomi (Baladina 2013: 127).

Negara yang berpihak, pasar yang sensitif atas problem kemasyarakatan serta warga kelas menengah dan kecil yang kreatif dan penuh inisiatif dalam melakukan kegiatan ekonomi akan menciptakan dinamika ekonomi politik yang sehat ke arah transformasi sosial yang berkeadilan (Awaworyi Churchill 2017: 581).



Selama ini transformasi ekonomi-politik hanya didominasi oleh negara dan capital (pasar), sementara masyarakat berada pada posisi marginal. Masyarakat seringkali hanya menjadi objek eksploitasi negara dan pasar (Facchini 2013: 142). Industrialisasi yang dikembangkan oleh negara dan pasar tak jarang memaksa orang kelas menengah dan kecil terisolasi dalam lingkungannya sendiri.

Potensi kekayaan alam yang berada di lingkungan masyarakat kelas menengah dan kecil kerap kali dieksploitasi melalui akses dan tatakelola dominasi negara dan pasar (Richard and Rudnyckij 2009: 62). Bahkan tak jarang pula terjadi benturan dan ketengangan antara industrialisasi yang digerakkan oleh negara dan pasar yang didomina oleh masyarakat kelas menengah dan kecil. Benturan ini dalam banyak hal menimbulkan kerugian bagi industrialisasi yang dikembangkan warga kelas menengah dan kecil, apakah dari segi aset, akses pasar yang berdampak pada menurunnya omzet dan pendapatan (Rudnyckij 2009: 108).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 belum terlihat akan berakhir, sementara di negara-negara Asia lainnya sudah menunjukkan gerak maju dengan pulihnya berbagai sektor perekonomian terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonominya seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduknya yang jauh melampaui pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sejak awal terjadinya krisis ekonomi yang melanda sebagian besar wilayah Asia (Turner 2000: 338).

Di saat Indonesia mengalami masa krisis moneter, banyak pelajaran berharga yang diperoleh berkenaan dengan dinamika industri ini. Industri besar yang digerakkan oleh pasar (pemodal besar) yang memperoleh sokongan negara dengan begitu besar tak sedikit yang tidak mampu bertahan sampai mengalami kebangkrutan (Rahmat 2017: 87). Sedangkan industri kecil, seperti *home industry* yang digerakan oleh masyarakat kelas menengah dan kecil mampu bertahan dan bersiasat menghadapi krisis ekonomi moneter. Ada memang yang terkena dampak pada penurunan omzet penjualan, namun ada juga yang justru omzet penjualannya meningkat tajam. Sesuatu yang pantas dihargai dari para pelaku industri kecil di perkotaan ini adalah di tengah keterbatasan modal dan alat mereka justru lebih mampu bertahan dari ancaman kemacetan pasar (Purnomo and Maulida 2017: 106). Gejala ini menunjukkan bahwa daya survival industri rakyat jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan industri besar yang dikembangkan oleh pasar yang selama ini justru dimanjakan oleh negara dan industri perbankan di tanah air (Lu and Lu 2010: 194).

Penelitian ini akan memaparkan dialektika antara negara dan pasar kaitannya dengan strategi entrepreneur muslim meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Entrepreneur Muslim di sini merujuk pada dua hal, yakni identitas keberagamaan dan praktek bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Islam (Ormiston and Seymour 2011: 128). Pertanyaan pokok dalam riset ini adalah bagaimana para entrepreneur muslim ini mengatasi kebijakan negara dan institusi pasar yang cenderung tidak berpihak pada pelaku industri menengah dan kecil? Cara dan strategi seperti apa yang mereka tempuh dalam mengakses kebijakan negara dan institusi pasar dalam mengerakkan usaha mereka? Apa saja problem dan kendala yang dihadapi oleh entrepreneur muslim ini? Apa saja capaian yang sedang mereka peroleh selama ini?

II. KERANGKA TEORI

Relasi ekonomi politik antara kawasan perkotaan dengan menengah dan kecil berlangsung secara timpang. Kondisi ini dapat dilihat dari praktekmodernisasi yang memposisikan kelas menengah dan kecil sebagai pemasok bahan dasar sementara kota sebagai pengolah atau penyedia jasa, karena kota memiliki kapasitas produksi yang memadai (Huda 2017: 83). Konteks semacam itu, sesungguhnya dapat menjelaskan mengapa proses modernisasi mendorong urbanisasi yang terus meningkat, khususnya negara-negara yang mengawali pembangunan, sebagaimana terjadi di Asia Tenggara (Nugroho, Lucky. Chowdhury 2015: 85).

Kondisi menengah dan kecil hanya menjadi target pasar itulah, sementara kemampuan memproduksi kelas menengah dan kecil juga tidak dimiliki, maka yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi kelas menengah dan kecil tetapi makin menggeja konsumerisme (budaya konsumtif). Sentralisasi perdagangan di perkotaan yang demikian dan ketidakseimbangan hubungan maka pelembagaan kesenjangan hubungan kelas menengah dan kecil dan kota makin membesar (Jones 2010: 620). Secara internal pula, di kelas menengah dan kecil mengalami ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dengan tingkat kebutuhan (berkonsumsi). Menguatnya proses produksi di perkotaan dengan memanfaatkan sumberdaya di kelas menengah dan kecil sebagai pemasok bahan baku, maka kelangkaan sumberdaya alam kelas menengah dan kecil menjadi tidak terhindarkan (Syaiful and Bahar 2017: 124).

Masyarakat menengah dan kecil hanya menjadi obyek negaranisasi oleh negara dan eksploitasi ekonomi oleh kapital. Pemilik modal tumbuh menjadi aktor yang otonom, kuat dan mampu mengendalikan negara, setidaknya-tidaknya para pejabat negara yang berlaku sebagai komprador (Lee, Rianti, and Park 2017:

136). Dengan kekuatan modal dan proteksi negara, pemilik modal bisa mengendalikan tanah dan penduduk desa. Negeranisasi telah membuat negara menjadi kuat dan mencengkeram masyarakat desa, tetapi kapasitas negara menjadi sangat lemah, terutama kapasitasnya dalam mengontrol modal dan melindungi masyarakat (Susminingsih 2013: 6).

Meskipun kelas menengah dan kecil hidup di bawah tekanan negara, tetapi elite kelas menengah dan kecil (terutama kelurahan) sangat menikmati dan mengambil keuntungan dari proses rekayasa politik ini (Januari 2014: 57). Sudah banyak laporan penelitian menunjukkan bahwa kepala kelas menengah dan kecil kerap kali menguasai, secara kedinasan maupun pribadi, lebih banyak tanah ketimbang warga kelas menengah dan kecil lain. Aparat kelurahan beserta kerabatnya adalah lapisan kaya di desanya, mempunyai aneka usaha, mendominasi pengelolaan KUD, memperoleh keuntungan yang tidak kecil dari proyek tebu rakyat; mereka juga mengawinkan anak perempuannya dengan kaum profesional kota atau pemilik tanah luas, mereka mengatur anak laki-lakinya menikah dengan anak kepala kelas menengah dan kecil tetangga, atau menempatkan mereka dalam keluarga-keluarga strategis atau jabatan-jabatan di level Kecamatan, dan sebagainya (Susminingsih 2013: 58).

Sementara itu, industrialisasi yang sudah berjalan lama, maupun pengembangan kawasan di menengah dan kecil yang tengah dikembangkan, hampir tidak memperoleh sentuhan *governance reform* (Rudnycky 2009b: 109). Banyak contoh membuktikan bahwa pengembangan industri di menengah dan kecil (mulai dari sampah, kawasan wisata, mall sampai pertambangan berat) selalu menimbulkan masalah konflik dengan masyarakat setempat (Baladina 2013: 129).

Orientasi pemilik modal, dalam konteks ini, hanya sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat risiko sosial terhadap masyarakat lokal. Sedangkan negara hanya mengejar devisa, para pejabat negara mengejar rente (*rent seeking*), dan elite kelas menengah dan kecil juga memperoleh keuntungan dari proses patronase itu. Negara betul-betul tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan *governance reform* (Januari 2014: 64). Di level desa, misalnya, sampai sekarang tidak mempunyai kewenangan dan ruang partisipasi untuk terlibat mengambil keputusan tentang eksploitasi tanah. Kewenangan memberikan izin investasi, yang *notabene* akan melakukan eksploitasi terhadap kawasan Johar Baru, merupakan domain pemerintah daerah. Proses investasi di kelas menengah dan kecil umumnya hanya dilakukan dengan cara bujuk-rayu terhadap elite desa, terutama Lurah, tanpa melalui proses pengambilan keputusan di kelas menengah dan kecil secara terlembaga, terbuka dan partisipatif (Huda 2017: 83).

Industrialisasi desa, mengutip pandangan Sarbini Sumawinata yang mendasarkan pada upaya desa, agar memperoleh pendapatan atau setidaknya tidaknya memiliki alat-alat produksi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, dengan memastikan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berjangka panjang, dan bukan hanya sekedar *survie*, atau meminjam istilah Scott dengan mental subsistensi. Lebih dari sekedar itu, industrialisasi kelas menengah dan kecil dilandasi pula spirit membangun ekonomi kerakyatan yang bervisi berkelanjutan (Baladina 2013: 129).

Pembangunan kelas menengah dan kecil dengan industrialisasi diharapkan mampu mengurangi kecenderungan pola ekonomi yang mendasarkan pertumbuhan perkotaan yang ditandai penyedotan kapasitas wilayah yang didominasi oleh pengusaha (Susminingsih 2013: 7). Dengan begitu, skenario yang diharapkan akan terjadi perimbangan pembagian keuntungan ekonomi dapat terlaksana.

Industrialisasi desa, kemungkinannya selain menjadi katup pengaman, sekaligus berfungsi pula sebagai “cagar ekonomi” dalam rangka mengatasi problem mobilitas modal kelas menengah dan kecil agar tidak ke luar. Industrialisasi, dipersiapkan sebagai *tools* untuk mengatasi kesenjangan, dimana kelas menengah dan kecil yang memiliki sumberdaya diikuti pula penyerapan kapasitas dalam mengolahnya (Lu and Lu 2010: 208).

Berkaitan ini, pengembangan industrialisasi dapat dibangun dengan skema pengembangan kawasan, mendasarkan pada kedekatan geografis dan keselarasan sumberdaya antar masyarakat menengah dan kecil (Purnomo and Maulida 2017: 107). Dengan kata lain, mendasari konsep industrialisasi kelas menengah dan kecil semacam itu, maka diperlukan perumusan paradigma baru, dengan menempatkan perspektif bahwa kelas menengah dan kecil bukan lagi menjadi agen konsumsi dan target pasar, tetapi mampu menciptakan arena pertumbuhan dan kesejahteraan (Syaiful and Bahar 2017: 126).

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah riset aksi. Riset ini mempunyai dua nalar metodologis, yakni refleksi dan preskripsi. Refleksi dimaksudkan untuk mengungkap secara dalam dan kritis tentang

proses, kaitan antar aktor, masalah, manfaat dan dampak industrialisasi. Tentu refleksi akan lebih banyak menemukan hal-hal yang bermasalah ketimbang hal-hal yang sukses, sehingga masalah-masalah itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Preskripsi dimaksudkan sebagai upaya mencari alternatif yang berpijak pada refleksi, seraya membangun prakarsa dan model baru tata keelola industrialisasi kelas menengah dan kecil yang membawa manfaat bagi masyarakat muslim di menengah dan kecil khususnya (Awaluddin 2017: 83).

Metodologi riset aksi yang berorientasi pada keberpihakan dan perubahan sosial. Jika riset akademik hanya melakukan pengumpulan dan analisis data, riset aksi merupakan pendekatan yang menyeluruh untuk mencari jalan keluar atas persoalan nyata yang terkait

dengan tata kelola pengembangan ekonomi lokal (Huda 2017: 82). Meski peneliti menggunakan metodologi riset aksi, tetapi tidak sepenuhnya menerapkan model *participatory action research*, yang *notabene* peneliti hanya melayani dan membahasakan aspirasi (masalah dan tindakan) partisipan (warga masyarakat yang mengalami problem dalam mengembangkan ekonomi lokal di kalangan pelaku industrialis Muslim (Januari 2014: 55).

Riset aksi yang akan digunakan berupaya mengedepankan prinsip dialektika antara “narasi besar” (perspektif) dan “narasi kecil” (pengalaman lokal), atau antara “sedikit” pengetahuan yang peneliti miliki dengan “banyak” pengalaman yang dijalankan oleh para aktor yang terlibat langsung dalam proses pengembangan ekonomi lokal melalui industrialisasi desa. Karena itu, yang *pertama*, pada tahap awal kami sebagai peneliti akan membekali diri dengan perspektif yang matang dan berpihak pada masyarakat yang terkena risiko industrialisasi.

Perspektif yang kami maksud adalah *governance* dalam industrialisasi yang melibatkan interaksi antara negara, modal, kelas menengah dan kecil dan masyarakat setempat, serta cara pandang *missink link* antara transformasi ekonomi dan transformasi politik yang sudah kami uraikan di depan. *Kedua*, dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lokal, kami tidak semata-mata melakukan penyedotan data secara sepihak, tetapi kami juga akan melakukan intervensi perspektif, membangun kesadaran kritis, dan mendorong aktor untuk bertindak. Inilah yang sering kita sebut proses belajar bersama antara peneliti dengan partisipan (aktor-aktor lokal), yang *notabene* berbeda dengan model penelitian konvensional, dimana peneliti hanya melakukan eksploitasi data secara sepihak terhadap objek penelitian.

Pengumpulan data di lapangan, aktor-aktor kunci di sektor pemerintahan, pasar dan entrepreneur muslim menjadi bagian penting dalam riset ini. Proses pengumpulan data dilakukan. *Pertama*, pengumpulan data dokumen-dokumen resmi pemerintah setempat maupun perusahaan swasta yang menjalankan usaha industrialisasi, yang terkait dengan kebijakan, proses dan hasil-hasil industrialisasi desa. Karena itu “izin penelitian” memang sangat dibutuhkan dalam konteks ini. *Kedua*, mengundang informan dari perwakilan *stakeholders* dalam suatu forum *Focus Group Discussion* (FGD). *Ketiga*, melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada beberapa informan kunci untuk memperdalam beberapa informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Bersamaan dengan pengumpulan data ini, kami juga akan melakukan intervensi pemberdayaan secara kritis, mengembangkan kapasitas mitra lokal, serta melakukan pemetaan dan analisis, serta rencana tindak lanjut. Forum FGD tentu akan sangat efektif untuk melancarkan riset aksi serta membangun dialektika yang kritis antara para peneliti dan partisipan. Riset aksi ini dilakukan dalam rentang waktu satu tahun, yakni dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017. Lokasi riset adalah Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat. Daerah ini dipilih karena entrepreneur usahwan muslim menjadi pendorong utama bertumbuhnya industrialisasi lokal di menengah dan kecil yang danimis dan responsif.

Potensi dan Problem Pengembangan Industrialisasi Desa

Potensi sosial ekonomi Kecamatan Johar Baru setidaknya dapat dipetakan menjadi tiga kawasan area strategis. *Pertama*, kawasan lereng pusat kota Jakarta yang memiliki potensi kekayaan sumber daya air. Di daerah ini dikembangkan industri keluarga salah tempat usaha yang dikembangkan oleh warga begitu semarak. *Kedua*, Wilayah ini memiliki kekayaan dan menjadi tempat dan pusat perdagangan. *Ketiga*, wilayah aglomerasi kota Jakarta Pusat, yang menjadi pusat aktivitas pendidikan, perdagangan, perhotelan dan jasa.

Kecamatan yang berpenduduk tak kurang dari 1.889.639 jiwa pada pertengahan tahun 2016 ini bila dilihat dari komposisi jenis lapangan usaha sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, yakni 32%. Adapun yang bekerja di sektor jasa sebanyak 22%. Sedangkan yang bekerja di sektor industri serta perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 12%. Melalui komposisi ini diatas menjelaskan betapa potensi alam dan sumber daya manusia kawasan ini berada di sektor menengah dan kecil. Dalam konteks ini tidak

berlebihan kiranya bila upaya untuk melakukan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki relevansi secara politis dan ekonomis agar taraf hidup warga semakin meningkat sejahtera.

Bila melihat potensi yang ada di Johar Baru, ada proses keterpaduan antara potensi alam dan sumber daya industri di kalangan masyarakat menengah dan kecil. Potensi alam sudah cukup lama digerakkan menjadi usaha-usaha industri untuk meningkatkan income ekonomi pendapatan warga. Adapun yang paling menonjol adalah industri kerajinan dan industri makanan olahan yang mayoritas beragama Islam, dengan prakarsa secara mandiri mampu melakukan diversifikasi usaha industri dan meminimalisir resiko anjloknya harga salak ketika datang musim panen, juga menciptakan daya serap tenaga kerja yang lebih luas di kalangan warga kelas menengah dan kecil.

Berbagai usaha industri di kalangan masyarakat menengah dan kecil itu sedari awal tumbuh melalui prakarsa, inisiatif dan kreatifitas di kalangan warga sendiri tanpa ada upaya dimobilisasi

oleh pemerintah DKI Jakarta. Mereka merintis usaha dari ketrampilan membangun proses produksi dan pemasaran bahkan tak jarang juga permodalan yang kesemuanya dibangun dari bawah, yakni di kalangan jaringan diantara sesama warga sendiri. Bahkan dalam segi pemasaran, tanpa bantuan pemerintah daerah para pengrajin mampu melakukan ekspor, yakni menjual produknya ke pasar Eropa.

Kekuatan survival ekonomi di kalangan rakyat kecil menengah dan kecil yang tidak saja dapat bertahan tapi justru berkembang di tengah terpaan krisis ekonomi nasional (Turner 2000: 342). Kenyataan berbeda justru dialami oleh ekonomi industri menengah dan besar yang tak sedikit mengalami kerontokan, bangkrut dan gulung tikar dihadapan krisis ekonomi nasional tahun 1998. Untuk melihat perbandingan jumlah industri kecil dan menengah di Kecamatan Johar Baru perkembangan yang ada jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah industri besar. Sebagaimana tertera berikut ini pada tabel 1.

Dari data di atas, tampak sekalipun jumlah unit usaha industri kecil dan rumah tangga lebih besar, namun nilai investasi dan nilai tambahnya memang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan industri besar (Awaworyi Churchill 2017: 581). Meskipun kalau diperhatikan sisi rasionalitasnya cukup beralasan dan tidak dapat diperbandingkan, mengingat dalam industri besar berhimpun lebih banyak modal dan sumberdaya manusia yang profesional sehingga menjadi sangat wajar bila memiliki nilai tambah yang lebih banyak, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Syaiful and Bahar 2017: 126).

Namun kalau dilihat dari kekuatan generiknya, bila pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius, tidak menutup peluang di masa depan industri kecil rumah tangga (home industry) ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Hatta, founding fathers dan bapak koperasi Indonesia. Potensi ini sampai sekarang memang masih terabaikan, padahal sudah menghasilkan kekuatan yang nyata. Di Kecamatan Johar Baru bahkan telah menjadi penyumbang komoditas yang cukup besar. Sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini pada tabel 2.

Tabel 1
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Dibandingkan dengan Industri Besar Tahun 2016

No	Uraian	Industri Kecil dan Rumah Tangga		Industri Besar dan menengah	
		Jumlah/Nilai	%	Jumlah/Nilai	%
1	Unit Usaha	129	0,17	14	5,19
2	Nilai Investasi	19.820.000	0,02	80.973.856.000	31,02
3	Nilai Bahan Baku	214.133.000	0,12	915.787160.000	123,36
4	Nilai Produksi	255.720.000	0,06	1.941.321.701.000	81,39
5	Nilai Tambah	11.587.000	0,01	18.095.441.000	4,52

Sumber: Dinas P2KPM Kecamatan.Johar Baru

Tabel 2
Sepuluh Komoditas Penyumbang Devisa Terbesar Tahun 2016

No	Komoditas	Nilai ekspor
	Pakaian Jadi (Garment)	US \$ 45,826,784.79
	Meubel kayu (Furniture)	US \$ 7,835,915.05
	Sarung Tangan Kulit	US \$ 7,242,362.29
	Lampu Pijar	US \$ 5,119,276.57
	Tekstil	US \$ 2,147,565.94
	Produk tekstil lainnya	US \$ 1,158,518.95

Sumber : Dinas P2KPM Kab.Johar Baru

Jika pemerintah daerah memiliki komitmen dan perencanaan partisipatif yang berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi lokal (PEL), yakni di tingkat menengah dan kecil maka potensi ekonomi yang kini cukup berkembang itu dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah. Mengapa demikian? Karena bila dilihat dari populasi perkembangan usaha industri dan daya serap tenaga kerja di tingkat masyarakat, mayoritas masih didominasi oleh warga menengah dan kecil. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga menggantungkan nasib hidupnya pada sector usaha kecil dan menengah. Inilah yang terjadi di Kecamatan Johar Baru, jumlah pelaku usaha industri kecil dan industri rumah tangga menduduki porsi sekitar 99% dari jumlah pelaku industri yang ada di Kecamatan Johar Baru. Dari prosentasi jumlah pelaku usaha industri kecil ini, bila dilihat berdasarkan kontribusi atau nilai pertumbuhannya memang hanya sebesar 35% dalam menghasilkan nilai tambah, khususnya dalam 5 tahun terakhir ini. Angka ini memang masih menggambarkan produktifitas industri kecil belum sebanding dengan jumlahnya banyak bertebaran. Memang masih ada jurang yang lebar bila dibandingkan jumlah industri besar yang populasinya sedikit, namun kontribusinya dari segi pendapatan daerah sangat besar. Sebagaimana yang tertera pada pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Perkembangan industri dari tahun 2015 s/d tahun 2016

No	Uraian	2001	2002	2003	2004	2005
	Jml. Ind. Besar & Menengah	56	64	71	77	81
	Jml. Ind. Kecil & RT	16.525	16.633	14.764	14.842	14.867
	Penyerapan Ten. Kerja	56.600	59.133	59.885	60.022	61.262
	Nilai Bahan Baku (000)	784.618.380	877.324.385	894.071.919	911.256.480	1.815.257.773
	Ind. Kecil & R T	151.994.645,4	155.586.524	163.292.893	178.634.577	178.848.710
	Ind. Besar dan Menengah	632.623.735	721.737.861	730.779.026	732.621.903	1.636.409.063
	Nilai Produksi (Rp juta)	1.336.029	1.472.405	1.510.818	1.532.575	2.454.728
	a. Ind. Kecil & R T	360.645	367.081	382.455	399.915	400.140
	b.Ind. Besar dan Mene ngah	975.384	1.105.324	1.128.363	1.132.660	2.054.587
	Nilai Tambah (000)	551.409.908,7	595.079.765	616.744.866	621.318.685	639.470.713
	Ind. Kecil & R T	208.650.015	211.493.597	219.161.706	221.280.485	221.292.072
	Ind. Besar dan Menengah	342.759.894	383.589.168	397.583.160	400.038.200	418.178.641

Sumber : Dinas P2KPM Kab.Johar Baru

Bila melihat data di atas, hal yang cukup menarik adalah bila melihat pertumbuhan ini khususnya sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, terus mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak membuat penurunan jumlah industri kecil di Kecamatan Johar Baru oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang membuat kebijakan yang tidak populis pada tahun 2015, yakni mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harganya melebihi angka 100% dari harga sebelumnya. Padahal kebijakan menaikkan harga BBM ini secara nasional memang memukul kondisi industri kecil dan besar di tanah air.

Data yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik UGM, menjelaskan bahwa pasca kenaikan BBM, Oktober 2016 yang lalu, tak kurang 6 ribu lebih industri kecil menengah di Indonesia gulung tikar karena cost produksi yang makin mahal. Untuk kasus industri kecil di kawasan Jakarta Pusat gejala deindustrialisasi-yakni penurunan absolut dalam aktifitas industri manufaktur, khususnya bila diukur dari penyerapan lapangan tenaga kerja dan penurunan unit usaha dalam jangka panjang, sebenarnya menurutnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2015. Jika pada tahun 2015 tenaga kerja terserap di sektor informal itu mencapai 233.322 orang, maka dua tahun setelahnya jumlahnya tinggal 190.710. Hal yang sama juga terjadi pada unit usaha, dari 110.184 (2015) menjadi 85.491 (2016).

Penurunan dua hal itu langsung berimbas pada omzet keseluruhan yang turun hampir mencapai Rp.2 triliun, yakni dari Rp.4,03 triliun jadi Rp. 2,15 triliun (Kompas, 20/10/16). Jika dilihat dari apa yang dilakukan dan dikembangkan oleh para industrialis menengah dan kecil sebenarnya kaya akan potensi untuk menjadi suatu kekuatan atau mesin ekonomi penggerak pertumbuhan dan kesejahteraan daerah, dan khususnya masyarakat menengah dan kecil. Namun amat disayangkan potensi yang kaya dari segi sumber daya alam dan manusianya ini masih miskin inovasi, khususnya dari segi sumber daya keorganisasian ekonomi, sangat jauh dari memadai.

Di kalangan para pelaku industri kecil manajemen tata usaha mereka masih dikelola secara serabutan. Begitu pula dengan manajemen produksi belum terangkai ke dalam ekspansi pasar yang stabil dan berkelanjutan. Sumberdaya keorganisasian yang lemah ini membuat mereka tak jarang menemui kesulitan dalam mengakses permodalan di perbankan. Di bidang pemasaran terkadang juga mengalami kesulitan memenuhi permintaan pasar yang mengalami ekstra peningkatan pada saat-saat tertentu yang bersifat dadakan.

Begitupula di tingkat kebijakan daerah, belum terdapat inovasi yang mampu mengerakkan pelaku industri kecil menengah dan kecil ini terorganisir secara baik melalui program-program unggulan yang makin membuat industri kecil ini berdaya secara keorganisasian dan kelembagaan serta jaringan, baik dari permasalahan produksi, permodalan, distribusi dan pemasaran. Tak heran ketika kondisi ini ini belum teratasi secara baik, kondisi ekonomi kerakyatan di menengah dan kecil belum mengalami perkembangan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi mikro dan makro di tingkat daerah dan nasional.

Strategi Mengakses Kebijakan Daerah dan Pasar

Adapun data Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016—2020 Kecamatan Johar Baru menetapkan arah kebijakan industri berbasis pertanian akan dilakukan melalui upaya membangun sektor pertanian ke arah agrobisnis dengan memperkuat sistem pertanian dalam arti luas. Tujuan yang diharapkan agar memberikan kontribusi PDRB yang meningkat sehingga memenuhi target pertumbuhan sampai 16, 82%. Selain itu juga berupaya mengembangkan industri kecil, UMKM, khususnya yang berorientasi ekspor, disamping meningkatkan penguasaan pengembangan dan penerapan IPTEK dalam usaha perekonomian, terutama UMKM. Serta mengembangkan industri yang menghasilkan input bagi sector pertanian dan pengolahan pasca panen (pembibitan, pembenihan, rekayasa biologi, pengembangan makanan olahan). Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan PDRB sektor industri agar memenuhi target pertumbuhan 19,17%.

RPJM di atas oleh Bappeda Kecamatan Johar Baru kemudian diformulasikan ke dalam perencanaan pembangunan tahun 2015 dan 2016 yang merumuskan bahwasannya arah kebijakan industri yang akan ditempuh di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan industri diarahkan untuk mengembangkan industri kecil, rumah tangga dan menengah dan kecil dengan peningkatan keterampilan melalui berbagai pelatihan, penguatan modal, peralatan, magang dan manajemen.
2. Pembangunan industri diarahkan sebanyak mungkin memanfaatkan dan mengolah bahan local dari hasil pertanian dan industri rancang bangun serta rekayasa dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik

untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka negeri maupun ekspor dengan penguasaan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari segi kualitas dan kuantitas.

3. Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan agar menjalin kemitraan yang lebih mantap, saling mendukung, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan antara industri kecil, rumah tangga dan menengah dan kecil dengan industri besar yang dikembangkan swasta atau pemerintah.
4. Pembangunan dan pengembangan industri menengah dan besar diarahkan agar sesuai dengan penataan ruang dan agar dapat menyerap tenaga kerja local sebanyak mungkin dan juga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
5. Industri yang memiliki wawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan dan peran serta masyarakat.

Sedangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Johar Baru tentang arah kebijakan umum (AKU) dan strategi prioritas APBD Kecamatan Johar Baru tahun 2015 dan 2016 dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat berupaya untuk mengembangkan industri dengan memanfaatkan bahan baku local dengan penerapan teknologi tepat guna. Memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku industri,

meningkatkan manajemen usaha, produksi dan pemasaran serta meningkatkan prasarana dan sarana perindustrian disamping peningkatan kualitas pelayanan perindustrian.

Adapun agenda yang ditempuh untuk merealisasikan arah kebijakan industrial tertuang dalam strategi dan prioritas APBD 2015 dan 2016 dalam bentuk program dan kegiatan. Seperti kebijakan untuk mengembangkan industri dan memanfaatkan bahan baku local dengan penerapan teknologi tepat guna dijabarkan kedalam bentuk program peningkatan kemampuan teknologi dan usaha industri (Awaluddin 2017: 85). Adapun bentuk kegiatan yang direncanakan adalah pemasyarakatan dan penerapan sistem pengendalian, pemasyarakatan pemakaian bahan makanan tambahan, dan pemasyarakatan SNI bagi masyarakat industri menengah (Purnomo and Maulida 2017: 107).

Namun demikian berbagai perencanaan strategis di atas tidak berjalan secara maksimal. Diantara berbagai kendala dan problem yang menjadi penyebabnya, yakni: **Pertama**, belum terjalannya integrasi dan interkoneksi arah kebijakan industri berbasis pertanian ke dalam program-program dinas di lingkungan Pemda. **Kedua**, pendanaan program kerja atau kegiatan hampir 60% lebih terserap pada pembiayaan birokrasi dibandingkan dengan yang menyentuh langsung pemberdayaan pada pelaku industri kecil dan menengah. **Ketiga**, belum terjalannya kemitraan strategis antara pemerintah dengan pelaku usaha industri menengah dan kecil melalui keorganisasian dan kelembagaan yang berkelanjutan. Kondisi ini membuat antara pelaku industri kecil dengan pemerintah daerah berjalan secara sendiri. Pertemuan dan kerjasama diantara keduanya lebih bersifat insidental, berdasarkan momen proyek dan sejenisnya sehingga tidak terkonsolidasi secara baik pada cita besar menjadikan UKM sebagai ujung tombak perekonomian daerah (Baladina 2013: 128).

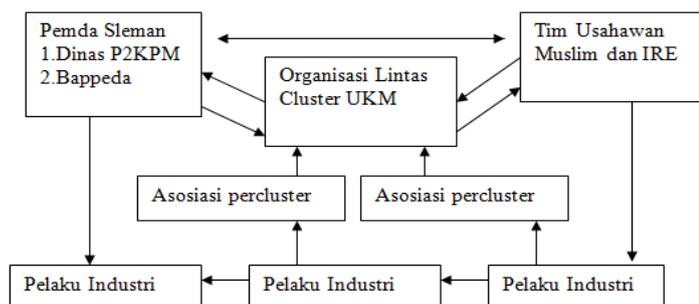
Melihat potensi dan kendala serta problem dalam pengembangan industri kecil menengah dan kecil di Kecamatan Johar Baru, peneliti (dari NGO dan komunitas entrepreneur muslim) melakukan terobosan melalui pendekatan kemitraan dengan para pemegang kebijakan dan para pelaku industri kecil menengah dan kecil. Berbagai kerjasama dan kegiatan dirintis, yakni mulai dengan pihak DPRD, Bappeda dan Dinas P2KPM Kecamatan Johar Baru.

Pada suatu Lokakarya Pengembangan Ekonomi Lokal di Johar Baru, dicapai beberapa kesepakatan agar dalam pembuatan regulasi daerah DPRD mendorong regulasi yang berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, yakni industri kerakyatan di tingkat menengah dan kecil. Selain itu juga memaksimalkan kontrol implementasi kebijakan daerah agar benar-benar konsisten pada pemberdayaan pelaku industri kecil menengah dan kecil dan juga melindungi serta memberdayakan mereka dari dinamika pasar global yang dapat berpotensi memarginalisasinya (Rokhim et al. 2017: 442).

Tak cukup sekedar membangun akses dan kesepakatan dengan DPRD, peneliti, khususnya para entrepreneur muslim juga melakukan kerjasama dengan Bappeda dan Dinas P2KPM untuk saling belajar berkenaan dengan problem yang selama ini ada dan pendekatan strategis menemukan jalan keluarnya. Dari berbagai rangkaian diskusi akhirnya dirumuskan pilihan strategis bahwasannya upaya untuk mendorong industrialisasi kerakyatan di tingkat menengah dan kecil adalah dengan cara memberdayakan pelaku industri itu sendiri melalui organisasi. Selama ini organisasi di kalangan pelaku industri kecil dan menengah di Kecamatan Johar Baru yang menghimpun berbagai cluster belum ada. Berbeda dengan tingkat Propinsi DKI Jakarta yang sudah lama ada. Di Kecamatan Johar Baru yang ada hanya organisasi berbasis cluster, seperti kerajinan dan makanan. Perkembangan organisasi itupun belum berjalan secara maksimal.

Untuk mengatasi kondisi di atas, komunitas ushawan muslim ini kemudian melakukan proses pengorganisir terhadap para pelaku industri kecil menengah dan kecil lintas cluster. Cara yang ditempuh adalah melakukan pendekatan dengan kontak person dari jaringan pelaku industri menengah dan kecil yang masing-masing mereka miliki, terutama saat berlangsungnya riset industri kerakyatan di Johar Baru dan jaringan yang dimiliki oleh Dinas P2KPM, khususnya para alumni pelatihan yang pernah diadakan pada pelaku industri kecil di Johar Baru. Jaringan entrepreneur muslim dan Dinas P2KPM ini kemudian dipadukan dan diorganisir melalui berbagai kegiatan, seperti fasilitasi, mediasi dan sejenisnya. Berikut ini bagan alur yang dikembangkan sebagai strategi kemitraan untuk memperdayakan pelaku industri kerakyatan di menengah dan kecil Kecamatan Johar Baru guna mengakses kebijakan pemerintah daerah.

Gambar 1. Alur Strategi Kemitraan



Peneliti secara intensif memfasilitasi para pelaku industri menengah dan kecil, mengurai problem yang mereka hadapi dan kebijakan daerah terhadap pemberdayaan kegiatan industri yang mereka kembangkan. Kemudian mereka sendiri (baca: para entrepreneur muslim) juga merumuskan bagaimana cara keluar dari masalah yang sedang dihadapi (Nugroho, Lucky. Chowdhury 2015: 87). Umumnya mereka menyadari bahwa tidak saja kebijakan daerah yang belum berpihak secara berkelanjutan dan konsisten dalam memberdayakan UKM di menengah dan kecil. Namun juga dikalangan para pelaku industri sendiri juga mengidap berbagai permasalahan. Dari problem egoisme, ingin berjalan sendiri-sendiri, akses terhadap birokrasi yang lemah sampai pada kemampuan manajerial pengembangan usaha yang tidak terencana yang dibiarkan berjalan apa adanya secara alamiah.

IV. KESIMPULAN

Liberalisasi perdagangan makin kencang melanda masyarakat. Bangsa Indonesia yang terlibat dengan berbagai perjanjian perdagangan juga tak bisa menutup diri. Memang yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah bukan bagaimana menolak globalisasi perdagangan itu, namun bagaimana mensiasatinya sebagai peluang.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya berada di lapisan masyarakat agraris, dan sebagian besar level usahanya berada di tingkatan usaha kecil dan menengah tampaknya perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah perlu melindungi dan memberikan akses kebijakan dan peluang pasar pada pelaku industri kecil menengah dan kecil ini. Seperti yang telah dilakukan oleh Pemda Johar Baru.

Ada proses saling membangun akses antara pelaku usaha kecil yang dimotori oleh entrepreneur muslim dengan Pemda untuk meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi desa. Proses yang berjalan secara baik, ini dimulai dari upaya saling membangun komunikasi sampai pada kegiatan bersama untuk terus mendorong peningkatan kapasitas usaha pelaku industri kecil di desa.

Para usahan muslim yang dari awal menyadari penting membuat organisasi, yang diberi nama IKAPIM, merupakan langkah taktis dan strategis dalam mengakses kebijakan Pemda dan pasar. Kondisi ini tentu potret positif yang perlu terus dikembangkan agar laju globalisasi pasar tidak memarginalisasikan para entrepreneur lokal. Entrepreneur yang kreatif, inovatif dan penuh prakarsa serta pemerintah daerah yang responsif dan sensitif adalah kunci untuk meraih peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian negara. Peran negara dan pasar sangat dibutuhkan untuk memberikan akses bagi pertumbuhan roda ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Suwanto. 2017. "Religious Entrepreneurship." *Exchange* 46 (4). Brill: 328–49. doi:10.1163/1572543X-12341455.
- Awaluddin, Murtiadi. 2017. "Pengaruh Kepribadian Entrepreneurship Islam Aan Akses Informasi Terhadap Strategi Bisnis Dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil Di Kota Makassar." *Iqtisaduna* 3 (1): 79–97. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/3556>.
- Awaworyi Churchill, Sefa. 2017. "Fractionalization, Entrepreneurship, and the Institutional Environment for Entrepreneurship." *Small Business Economics* 48 (3). Springer US: 577–97. doi:10.1007/s11187-016-9796-8.
- Baladina, Nur. 2013. "Membangun Konsep Entrepreneurship Islam." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 13 (2): 123–36. doi:10.18860/ua.v0i0.2371.
- Facchini, François. 2013. "Economic Freedom in Muslim Countries: An Explanation Using the Theory of Institutional Path Dependency." *European Journal of Law and Economics* 36 (1). Springer US: 139–67. doi:10.1007/s10657-011-9250-y.
- Huda, Choirul. 2017. "Etos Kerja Pengusaha Muslim: Studi Kasus Pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (2): 79. doi:10.21580/economica.2016.7.2.1156.
- Janwari, Yadi. 2014. "Entrepreneurship of Traditionalists Muslim at Tasikmalaya, West Java." *International Journal of Nusantara Islam* 1 (1): 54–72. doi:10.15575/ijni.v1i1.36.
- Jones, Carla. 2010. "Materializing Piety: Gendered Anxieties about Faithful Consumption in Contemporary Urban Indonesia." *American Ethnologist* 37 (4): 617–37. doi:10.1111/j.1548-1425.2010.01275.x.
- Lee, Yohan, Indri Puji Rianti, and Mi Sun Park. 2017. "Measuring Social Capital in Indonesian Community Forest Management." *Forest Science and Technology* 13 (3). Taylor & Francis: 133–41. doi:10.1080/21580103.2017.1355335.
- Lu, Long-Chuan, and Chia-Ju Lu. 2010. "Moral Philosophy, Materialism, and Consumer Ethics: An Exploratory Study in Indonesia." *Journal of Business Ethics* 94 (2). Springer Netherlands: 193–210. doi:10.1007/s10551-009-0256-0.
- Nugroho, Lucky. Chowdhury, Syed Lutful Kabir. 2015. "Mobile Banking for Empowerment Muslim Women Entrepreneur: Evidence from Asia (Indonesia and Bangladesh)." *TIFBR: Tazkia Islamic Finance and Business Review* 9 (1): 83–100. <http://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/79>.
- Ormiston, Jarrod, and Richard Seymour. 2011. "Understanding Value Creation in Social Entrepreneurship: The Importance of Aligning Mission, Strategy and Impact Measurement." *Journal of Social Entrepreneurship* 2 (2): 125–50. doi:10.1080/19420676.2011.606331.
- Purnomo, Agus, and Atika Zahra Maulida. 2017. "Implementasi Islamic Financial Planning Dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta." *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14 (1): 103. doi:10.19105/nuansa.v14i1.1315.
- Rahmat, Abdul. 2017. "Entrepreneurial Management Coastal Muslim In The Village Bongo Gorontalo." *Ikonomika* 2 (1): 85–92. doi:10.24042/febi.v2i1.944.
- Richard, Analiese, and Daromir Rudnyckyj. 2009. "Economies of Affect." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 15 (1): 57–77. doi:10.1111/j.1467-9655.2008.01530.x.
- Rokhim, Rofikoh, Sari Wahyuni, Permata Wulandari, and Fajar Ayu Pinagara. 2017. "Analyzing Key Success Factors of Local Economic Development in Several Remote Areas in Indonesia." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 11 (4): 438–55. doi:10.1108/JEC-09-2015-0049.
- Rudnyckyj, Daromir. 2009a. "Spiritual Economies: Islam and Neoliberalism in Contemporary Indonesia." *Cultural Anthropology* 24 (1). Blackwell Publishing Inc: 104–41. doi:10.1111/j.1548-1360.2009.00028.x.
- . 2009b. "Market Islam in Indonesia." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 15 (May): S183–201. doi:10.1111/j.1467-9655.2009.01549.x.
- Strassler, Karen. 2009. "The Face of Money: Currency, Crisis, and Remediation in Post-Suharto Indonesia." *Cultural Anthropology* 24 (1): 68–103. doi:10.1111/j.1548-1360.2009.00027.x.
- Susminingsih. 2013. "Neuroekonomi Dan Trust Pada Mentalitas Entrepreneur Muslim Di Kota Pekalongan." *Jurnal Penelitian* 7 (1): 1–10. doi:10.28918/JUPE.V7I1.208.
- Syaiful, Irfan Aulia, and Ririn Nur Abdiah Bahar. 2017. "Peran Spiritualitas Dan Kepuasan Hidup Terhadap

Kualitas Hidup Pada Wirausahawan Muda.” *Humanitas* 13 (2): 122.
doi:10.26555/humanitas.v13i2.6068.

Turner, Sarah. 2000. “Globalisation, the Economic Crisis, and Small Enterprises in Makassar, Indonesia: Focusing on the Local Dimensions.” *Singapore Journal of Tropical Geography* 21 (3). Blackwell Publishers Ltd: 336–54. doi:10.1111/1467-9493.00085.